KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			=					
KEMENTERIAN KEUANGAN RI		H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 6 0 1				H.4 X Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
A. IDENTITAS	PENERIMA PENGHASI	AN YAN	G DIPOTONG					
A.1 NPWP : 8 2 6 4 6 4 4 5 5 7 2 2 0 0 0								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : KARTIKA RIZKY ANANDA								
B. PPh PASAL	21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMI	AH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2			B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4 21-402-01			3.000.000	3.000.000	0	5	150.000	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04392/LS-THR/RSJD.AHM/2022								
	Nama Do	kumen	Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor : Tanggal dd mmyyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0					
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
	nit Organisasi :		╡└ ┷╅				_	
C.4 Tanggal	:	2 (6 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Pe	TUAND I		DY					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :			Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
			ai dengan ketentuan yang onik sehingga tidak diperl	i berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	k mengatur bahwa do	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

K7TC5SB7